

SKRIPSI

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS DAN AKIBAT PELAKSANAAN WAJIB MILITER DI
NEGARA LAIN**



Oleh:

ANNISA REGITA CAHYANI

NIM. 031811133137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS DAN AKIBAT PELAKSANAAN WAJIB MILITER DI
NEGARA LAIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



ZENDY W. A. W. PRAMESWARI,
S.H., LL.M.
NIP. 198303242006042002

PENYUSUN



ANNISA REGITA CAHYANI
NIM. 031811133137

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 17 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : 1. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.

NIP. 197506041999032003



Anggota : 1. Zandy W. A. W. Prameswari, S.H.

LL.M.

NIP. 198303242006042002



2. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.

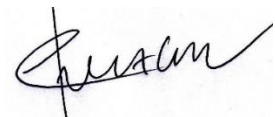
NIP. 195705011987012001



3. Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H.,

M.H., LL.M.

NIP. 198001232009121005



4. Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H.,

LL.M.

NIP. 198512082008122001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Regita Cahyani
NIM : 031811133137
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Hubungan antara Kewarganegaraan Ganda
Terbatas dan Akibat Pelaksanaan Wajib Militer di
Negara Lain

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Annisa Regita Cahyani
NIM. 031811133137

MOTTO

Laa ilaaha illaa anta sub-haanaka innii kuntu minadh-aalimiin (21:87)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain daripada itu, tujuan ditulisnya Skripsi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kewarganegaraan ganda terbatas dan akibat pelaksanaan wajib militer di negara lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. dan A. Indah Camelia, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah sabar menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;

4. Para Dosen Penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan;
6. Orang tua penulis, Eko Sugeng Riyadi dan Musriana Basri yang telah menjadi orang tua paling *supportive*, tidak pernah menuntut satu hal apapun, dan telah membesarkan penulis hingga dapat menjadi seorang Sarjana, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan formil maupun materil hingga saat ini;
7. Keluarga Besar BSO MYMA Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menjadi tempat untuk tumbuh dan berproses selama penulis berkuliah;
8. Sahabat tercinta penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang di antaranya ada Diajeng Woro, Dita Elvia, Trischa Galuh, Swesty Adeng yang dengan sabar menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini; dan
9. James Faizal Budiono dan keluarga yang juga tidak pernah ada henti-hentinya menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau

kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penyusun

ABSTRAK

UU Kewarganegaraan Indonesia yang lama telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru. Kewarganegaraan di Indonesia yang pada mulanya menganut asas kewarganegaraan tunggal, kini menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006. Asas kewarganegaraan ganda terbatas berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau sudah kawin yang bertujuan untuk melindungi hak anak dalam memilih kewarganegaraan yang dikehendaki. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum untuk tunduk pada dua yurisdiksi dua negara pemberi kewarganegaraan ganda. Salah satu fenomena yang menarik adalah apabila salah satu negara pemberi kewarganegaraan menerapkan wajib militer. Dalam kondisi tersebut, anak dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu kesediaan melaksanakan wajib militer dan status kewarganegaraan. Wajib militer adalah salah satu bentuk ikatan dan bentuk kesetiaan warga negara terhadap negaranya. Pelaksanaan wajib militer di negara lain dapat diasumsikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan dapat mempengaruhi status WNI anak tersebut, seperti pencabutan status WNI. Ketentuan pelaksanaan wajib militer di negara lain bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak diatur secara jelas dalam UU Kewarganegaraan sehingga dapat menimbulkan kekaburan hukum. Status kewarganegaraan memiliki arti begitu penting karena selain sebagai identitas, status kewarganegaraan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Untuk itu, Penelitian ini bertujuan guna memaparkan ketentuan pelaksanaan wajib militer oleh anak berkewarganegaraan ganda serta akibat hukumnya terhadap status WNI dan perolehan hak konstitusionalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Wajib Militer, Hak Konstitusional

ABSTRACT

The old Indonesian Citizenship Law has been amended by Law No. 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia. Citizenship in Indonesia, which initially adhered to the principle of single citizenship, now applies the principle of limited dual citizenship for children who meet the provisions in Article 4 letters c, d, h, l, and Article 5 of Law No. 12 of 2006. The principle of limited dual citizenship applies until the child is 18 years old or married, which aims to protect the child's right to choose the desired nationality. The existence of this provision has legal consequences for submitting to the two jurisdictions of the two countries granting dual citizenship. One interesting phenomenon is when one of the citizenship-giving countries implements military service. In these conditions, children are faced with two difficult choices, namely the willingness to carry out military service and citizenship status. Military service is a form of bond and form of loyalty of citizens to their country. The implementation of military service in other countries can be assumed as a form of betrayal of the state and can affect the child's Indonesian citizen status, such as the revocation of the Indonesian citizen status. Provisions for the implementation of military service in other countries for children with dual citizenship are not clearly regulated in the Citizenship Law so that it can cause legal confusion. Citizenship status has a very important meaning because apart from being an identity, citizenship status serves as a form of legal protection for citizens as legal subjects who have constitutional rights guaranteed by the state. For this reason, this study aims to explain the provisions for the implementation of military service by children with dual citizenship and the legal consequences for the status of Indonesian citizens and the acquisition of their constitutional rights. The method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: *Limited Dual Citizenship, Military Service, Constitutional Rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	9
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	10
1.5.3 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14

1.6.	Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II	PELAKSANAAN WAJIB MILITER DI NEGARA LAIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG MEMPUNYAI KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS	
2.1.	Aturan Kewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia	16
2.2.	Pelaksanaan Wajib Militer di Korea Selatan dan Mesir serta Konsep Wajib Militer di Indonesia	19
2.2.1	Korea Selatan	20
2.2.2	Mesir	25
2.2.3	Indonesia	27
2.3.	Kasus Potensial di Lingkup Wajib Militer bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	33
2.4.	Akibat Hukum Melaksanakan Wajib Militer di Negara Lain	40
BAB III	PEROLEHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS YANG TELAH MELAKSANAKAN WAJIB MILITER DI NEGARA LAIN	
3.1.	Hak Konstitusional dalam Hukum Indonesia	45
3.2.	Penegakan Hak Konstitusional di Indonesia	56
3.3.	Hak Konstitusional bagi Seseorang yang Telah Melaksanakan Wajib Militer di Negara Lain	61
BAB IV	PENUTUP	

4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	68
DAFTAR BACAAN	70

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987.

Egypt's Constitution of 2014.

Law No. 154 Year 2004 - Amending some Provisions of Law No. 26 of 1975
concerning Egyptian Nationality.

Military Service Act of the Republic of Korea No. 4685 Year 1993.

Nationality Act of the Republic of Korea, Act No. 10275, May 4, 2010.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Wajib Militer Korea Selatan dan Mesir, serta Bela Negara di Indonesia	33
-----------	--	----